

LAPORAN TAHUNAN



BPR
RAKYAT MANDIRI

20
24



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
SEJARAH PT. BPR RAKYAT MANDIRI	2
STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMILIKAN SAHAM	3
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 31 DESEMBER 2024 (TELAH	6
PENJELASAN NPL	11
PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAINNYA	12
STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN	14
BIDANG USAHA	16
PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR	17
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEGIATAN	19
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN & KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	21
DOKUMEN PENDUKUNG	22

SEJARAH

PT. BPR RAKYAT MANDIRI

PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Rakyat Mandiri, Berkedudukan di Baubau, Sulawesi Tenggara. Awal pendirian dengan nama PT. BPR Mustika Utama Baubau, dengan Akta Notaris No.21 di Kendari tanggal 13 Maret 2003, dan telah di perbarui kembali dengan Akta Notaris No. 17 b tanggal 11 Februari 2006. Akta pendirian Perseroan Terbatas telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing – masing Nomor: C-18588 HT.01.01. Tahun 2003 tertanggal 7 Agustus 2003 dan Nomor: C-10419 HT.01.04 Tahun 2006 tertanggal 12 April 2006. Kemudian di rubah dalam berita acara rapat Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Keraton No.28 tanggal November 2008 di kota Baubau dan di ubah lagi menjadi PT. BPR Sejahtera sesuai dengan Keputusan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 00908.AH.01.02 Tahun 2012 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2012 dan di resmikan menadi PT. BPR Rakyat Mandiri tanggal 30 Januari 2013.

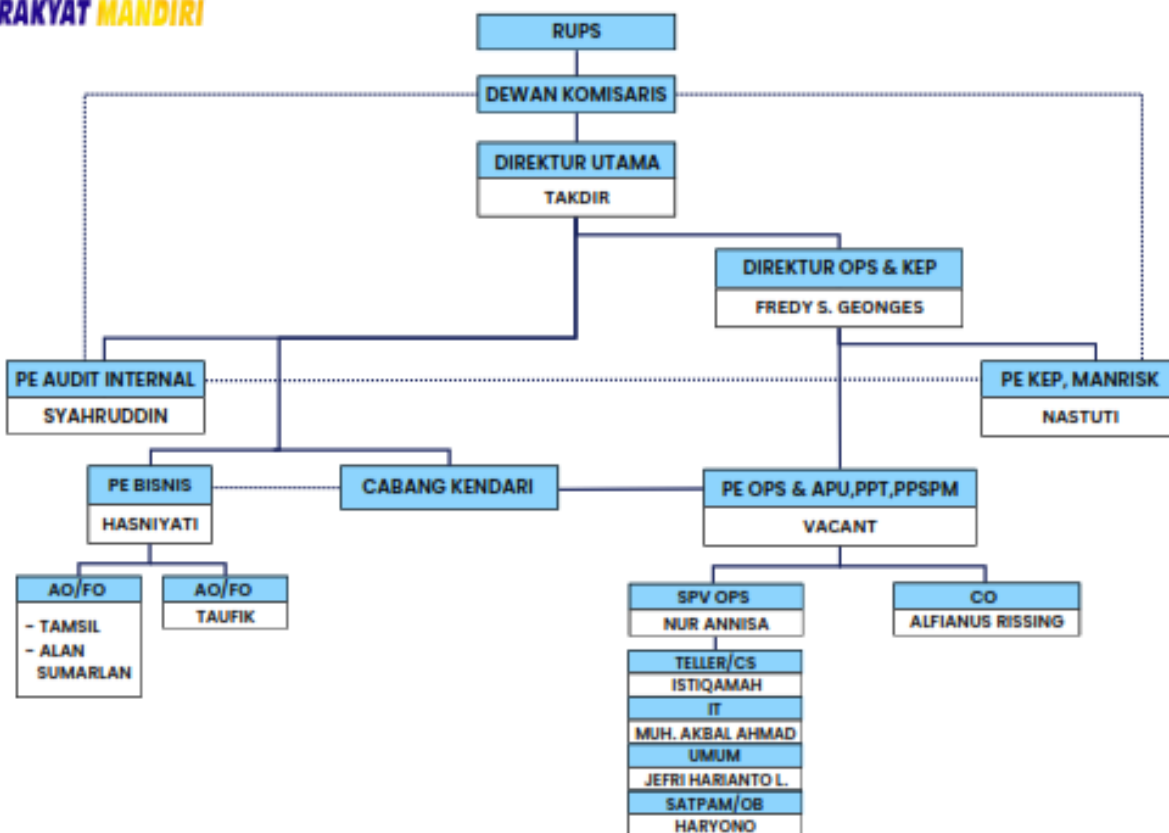
Akta pendirian No.21 PT. BPR Mustika Utama Baubau sekarang PT. BPR Rakyat Mandiri tertanggal 13 Maret 2003 pasal 3 Menyatakan maksud dan tujuan dari Perseroan ini adaklah berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat atau BPR

Dan pada bulan Juli 2021 dilakukan Margen antara BPR Kendari dan Bpr Baubau sekaligus pergantian nama menjadi BPR Rakyat Mandiri (Pusat) di Baubau dan BPR Rakyat Mandiri Cabang Kendari.

STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMILIKAN SAHAM



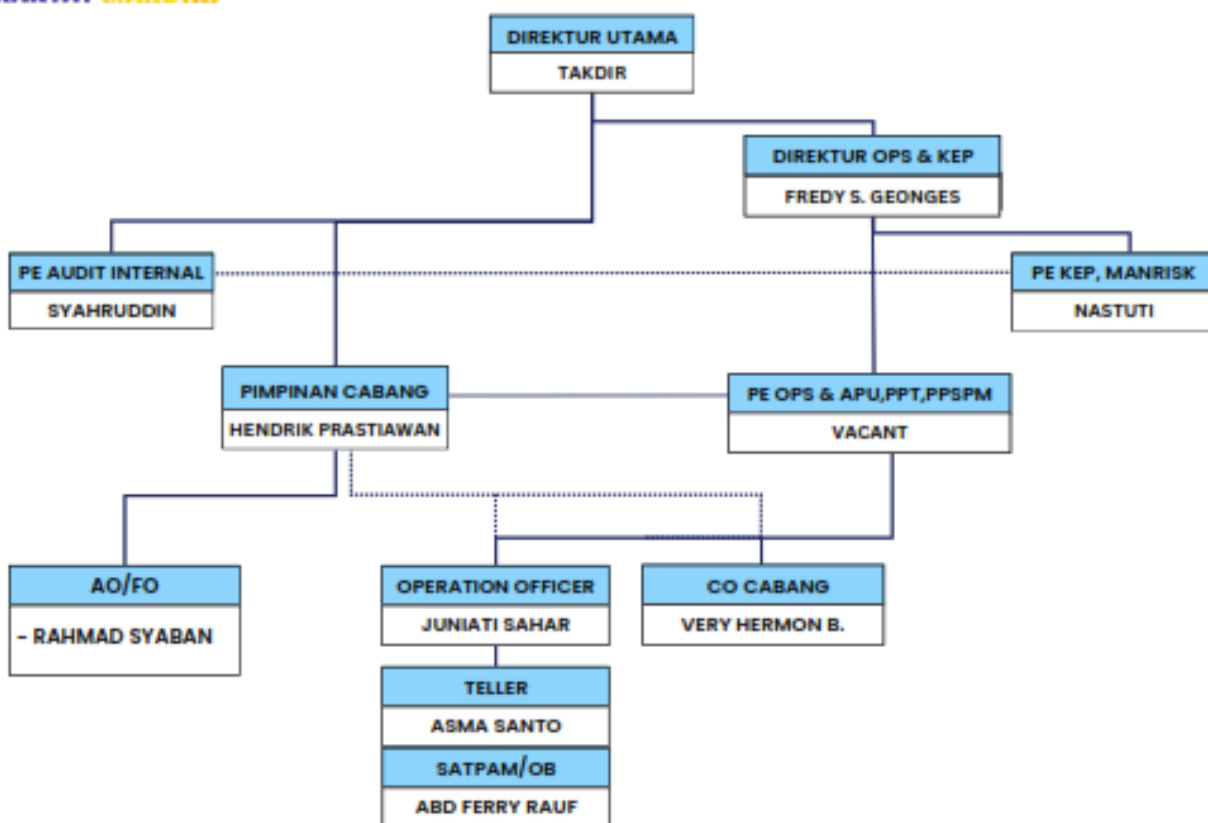
KANTOR PUSAT



STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMILIKAN SAHAM



KANTOR CABANG



STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMILIKAN SAHAM

Pemegang Saham						Ultimate Shareholders
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	
Arnold Lesse	Jl. Kelapa No. 09 Kel Batulo Kec. Wolio Kota Baubau	01	02	96.000.000	0,55	
Fredy S Georges	Jl. Kelapa No. 09 Kel Batulo Kec. Wolio Kota Baubau	01	02	384.000.000	2,20	
Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam	Jl. Jendral Ahmad Yani No.7 Kel. Analwol Kec. Kadia Kota Kendari	01	01	5.486.000.000	31,45	
Nur Amin	Jl. Sanggoleo RT/RW 004/002 Kota Kendari	01	02	436.000.000	2,50	
Robby Adrian Pondiu	Jl. Bunga Anggrek Mo. 6A Kota Kendari	01	02	1.308.000.000	7,50	
Takdir	Jl. Lakarambau RT/RW 002/003 Betoambari Kota Baubau	01	02	490.000.000	2,81	
Sitya Glona Nur Alam	Jl. Palembang 1 No. 29 Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi	01	02	4.186.000.000	24,00	
Erozha Genastry Nur Alam	Jl. Jendral Ahmad Yani No.71 Kel. Analwol Kec. Kadia Kota Kendari	01	02	4.186.000.000	24,00	
Depid	BTN DPR Blok B No. 6 Kota Kendari	01	02	872.000.000	4,99	

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 31 DESEMBER 2024 (TELAH DIAUDIT KAP)

PT BPR RAKYAT MANDIRI
NERACA
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Operasional	3a, 4	749,974,900	462,977,700
Pendapatan Bunga yang akan Diterima	3b, 5	412,947,776	400,864,071
Penempatan pada Bank Lain	3c, 3d, 6	9,118,122,954	5,597,170,763
Kredit yang Diberikan	3c, 3e, 7	18,923,658,511	19,594,755,876
Agunan Yang Diambil Alih	3g, 8	662,841,173	752,952,281
JUMLAH ASET LANCAR		29,867,545,314	26,808,720,691
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap (Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan 2024 sebesar Rp937.098.291 dan 2023 sebesar Rp821.954.431)	3h, 9	532,062,199	621,119,659
Aset Tidak Berwujud	3i, 10	1	1
Aset Tidak Lancar Lain-Lain	3j, 11	526,829,956	658,608,971
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		1,058,892,156	1,279,728,631
JUMLAH ASET		30,926,437,470	28,088,449,322

PT BPR RAKYAT MANDIRI
NERACA
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	12	202,610,025	289,526,785
Utang Pajak	13	1,790,502	93,486,518
Simpanan	3k, 14	20,841,819,963	18,105,313,496
Simpanan Dari Bank Lain	15	6,298,986	306,277,851
Pinjaman yang Diterima	3l, 16	2,109,485,232	2,266,237,221
Kewajiban Lain-lain	17	164,297,155	150,843,102
JUMLAH KEWAJIBAN		23,326,301,863	21,211,684,973
EKUITAS			
Modal Disetor	18	17,444,000,000	17,444,000,000
Laba (Rugi) Ditahan Tahun Sebelumnya		(10,567,235,603)	(11,832,630,886)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		723,371,210	1,265,395,235
JUMLAH EKUITAS		7,600,135,607	6,876,764,349
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30,926,437,470	28,088,449,322

PT BPR RAKYAT MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	3m, 19	5,340,970,919	5,332,518,866
Pendapatan Operasional Lainnya	3m, 20	582,858,022	615,006,400
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>5,923,828,941</u>	<u>5,947,525,266</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Bunga	3n, 21	(1,057,118,385)	(978,255,527)
Beban Penyisihan Penghapusan & Penyusutan	3n, 21	(356,992,992)	(392,711,241)
Beban Pemasaran	3n, 21	(9,468,500)	(15,917,530)
Beban Administrasi dan Umum	3n, 21	(3,412,630,093)	(2,953,573,309)
Beban Operasional Lainnya	3n, 21	(254,998,556)	(83,827,303)
Jumlah Beban Operasional		<u>(5,091,208,526)</u>	<u>(4,424,284,910)</u>
LABA OPERASIONAL		832,620,415	1,523,240,356
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	3o, 22	49,784,992	165,844,663
Beban Non Operasional	3o, 22	(49,401,470)	(228,510,471)
Jumlah Pendapatan (Beban Lain-lain)		<u>383,522</u>	<u>(62,665,808)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		833,003,937	1,460,574,548
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:			
Pajak Kini	3s, 23	(109,632,727)	(195,179,313)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		(109,632,727)	(195,179,313)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		723,371,210	1,265,395,235

PT BPR RAKYAT MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
		Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Ekuitas Awal per 1 Januari 2023	17,444,000,000	-	(11,832,630,886)	5,611,369,114
Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-	-	1,265,395,235	1,265,395,235
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023	17,444,000,000	-	(10,567,235,651)	6,876,764,349
Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-	-	723,371,210	723,371,210
Koreksi Laba (Rugi) Ditahan	-	-	48	48
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024	17,444,000,000	-	(9,843,864,393)	7,600,135,607

PT BPR RAKYAT MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	723,371,210	1,265,395,234
Penyesuaian:		
Penyusutan Aset Tetap	115,143,859	96,667,840
Penurunan atau (Kenaikan):		
Penempatan pada Bank Lain	(3,520,952,191)	(72,031,019)
Pendapatan Bunga yang akan Diterima	(12,083,705)	(151,498,727)
Kredit yang Diberikan	671,097,365	(3,326,430,435)
Agunan Yang Diambil Alih	90,111,108	210,000,000
Kewajiban Segera	(86,916,760)	119,946,594
Utang Pajak	(91,696,016)	46,027,005
Simpanan	2,736,506,467	463,940,519
Simpanan dari Bank Lain	(299,978,865)	(299,979,506)
Pinjaman yang Diterima	(156,751,989)	1,641,237,221
Kewajiban Lainnya	13,454,053	6,665,983
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	181,304,536	(59,291)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Kenaikan) atau Penurunan:		
Aset Tetap	(26,086,399)	(464,174,000)
Aset Tidak Lancar Lain-lain	131,779,015	152,629,391
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	105,692,616	(311,544,609)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan atau (Penurunan):		
Koreksi Laba Rugi Ditahan	48	774,581,600
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	48	-
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	749,974,900	462,977,700
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	236,997,280	(311,603,909)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	462,977,700	

Penjelasan NPL

Penyebab Utama Peningkatan NPL Tahun 2024:

1. Penurunan Kemampuan Bayar Debitur:
 - Pendapatan dan profit usaha menurun.
 - Inflasi tinggi menyebabkan daya beli melemah dan biaya operasional meningkat.
2. Moral Hazard dan Risiko Pribadi:
 - Niat tidak baik debitur, spekulasi, atau penyalahgunaan dana.
 - Gangguan ekonomi akibat sakit parah atau kecelakaan.
3. Kelemahan dalam Proses Kredit:
 - Kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
 - Agunan tidak marketable atau nilainya tidak memadai.
 - Verifikasi data debitur tidak akurat.
4. SDM dan Pengawasan yang Lemah:
 - Keterbatasan tenaga analis kredit.
 - Pengawasan dan pembinaan kredit kurang efektif.
 - Terlambat mengidentifikasi potensi kredit bermasalah.
 - Strategi penanganan kredit macet belum optimal.

Langkah-Langkah Penyelesaian:

1. Penguatan Analisis dan Verifikasi Kredit:
 - Tingkatkan akurasi data debitur dan kelayakan agunan.
 - Terapkan prinsip prudential banking secara konsisten.
2. Peningkatan Kapasitas SDM:
 - Latih dan tambah tenaga analis kredit yang kompeten.
 - Perkuat sistem monitoring dan evaluasi kredit.
3. Penanganan Kredit Bermasalah secara Proaktif:
 - Lakukan restrukturisasi lebih awal dan pendekatan intensif kepada debitur.
 - Terapkan strategi penagihan dan penyelesaian kredit macet yang lebih agresif dan terukur.
4. Mitigasi Risiko Eksternal:
 - Kaji ulang sektor usaha yang terdampak inflasi tinggi.
 - Diversifikasi portofolio kredit untuk mengurangi eksposur risiko sektor tertentu.

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT. BPR RAKYAT MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

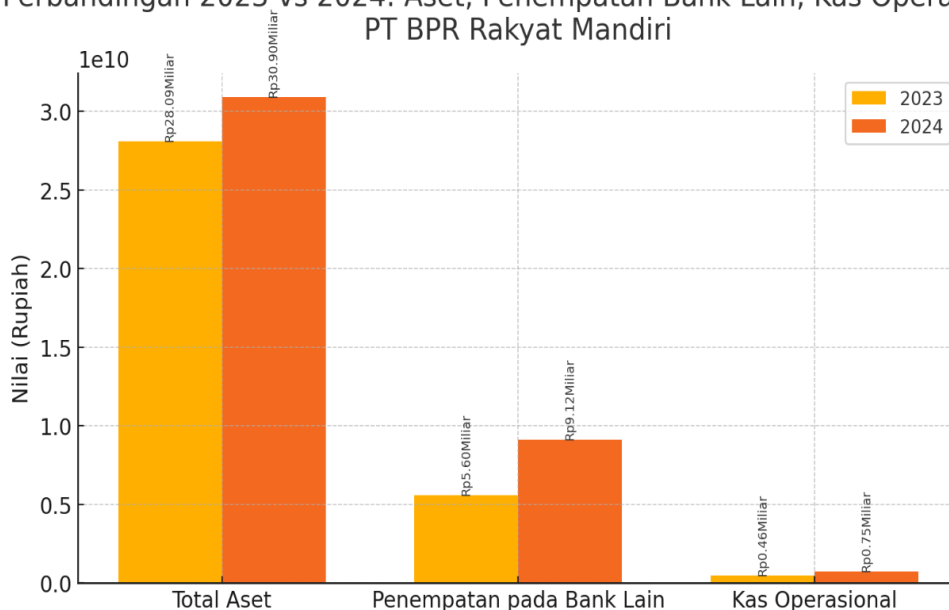
Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

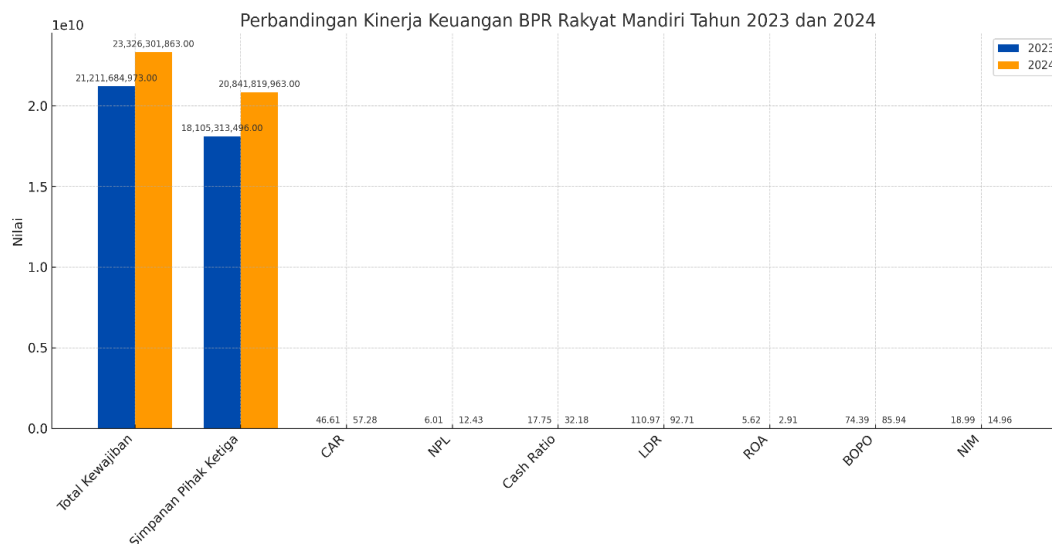
Dari perkembangan kondisi keuangan ditahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- Dari sisi aset, jika dibandingkan dengan posisi aset tahun sebelumnya, aset Bank PT BPR Rakyat Mandiri mengalami peningkatan sebesar Rp2,813,944,264 (10,02%) dari Rp28,088,449,322 menjadi Rp30,902,393,586. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penempatan pada bank lain sebesar Rp3,520,952,191 (62,91%) dari Rp5,597,170,763 menjadi Rp 9,118,122,954. Selain itu, adanya peningkatan akun kas operasional sebesar Rp286,997,200 (61.99%) dari Rp462,977,700 menjadi Rp749,974,900.

Perbandingan 2023 vs 2024: Aset, Penempatan Bank Lain, Kas Operasional
PT BPR Rakyat Mandiri



- b. Dari sisi passiva, total kewajiban Bank PT BPR Rakyat Mandiri mengalami peningkatan sebesar Rp2,114,616,890 (9.97%) dari Rp21,211,684,973 menjadi Rp23,326,301,863. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan simpanan pihak ketiga yaitu sebesar Rp2,736,506,467 (15.11%) dari Rp18,105,313,496 menjadi Rp20,841,819,963.
- c. Dari sisi permodalan, Rasio CAR BPR sebesar 57.28% naik sebesar 10.67% dari 46.61% menjadi 57.28%.
- d. Terdapat peningkatan Rasio NPL posisi 31 Desember 2024 sebesar 6.42% dari 6.01% menjadi 12.43%, hal ini menunjukkan kualitas kredit yang memburuk.
- e. Dari sisi likuiditas, Cash Ratio mengalami posisi yang baik dari peningkatan sebesar 14.43% dari 17.75% menjadi 32.18% dan long to deposit ratio menunjukkan penurunan sebesar 18.26% dari 110.97% menjadi 92.71%.
- f. Dari sisi rentabilitas, Rasio ROA mengalami penurunan sebesar 2.71% dari 5.62% menjadi 2.91%. Rasio BOPO menunjukkan sisi negatif yang tercermin dari peningkatan rasio BOPO sebesar 11.55% dari 74.39% menjadi 85.94%. Di lain sisi, Rasio NIM mengalami penurunan sebesar 4.03% dari 18.99% menjadi 14.96%.



- g. Fokus ke depan perlu diberikan pada:
 - Perbaiki kualitas kredit (restrukturisasi, penagihan, kebijakan kredit yang lebih selektif).
 - Efisiensi biaya operasional dan peningkatan margin laba (NIM).
 - Peningkatan produktivitas dan pengawasan portofolio pinjaman.

B. Perubahan Penting Lainnya

- Tidak ada perubahan yang begitu signifikan namun BPR sedang merencanakan infrastuktur secara bertahap menuju pelayanan berbasis digital.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT. BPR RAKYAT MANDIRI
Posisi Laporan : 2024

Strategi dan kebijakan manajemen yang dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan usaha PT BPR Rakyat Mandiri selama tahun 2024:

Fokus Utama:

- Kecukupan Modal
- Pertumbuhan Aset Sehat
- Efisiensi Biaya
- Peningkatan SDM
- Kualitas Layanan Tetap Terjaga

Arah Kebijakan

1. **Transformasi Adaptif**
→ Penyesuaian regulasi, penguatan struktur, & layanan berbasis teknologi
2. **Stabilitas Kesehatan Bank**
→ Upaya terukur untuk mempertahankan predikat **Sehat**
3. **Good Governance & Manajemen Risiko**
→ Penerapan tata kelola dan mitigasi risiko

Strategi Penghimpunan Dana

- **Produk Tabungan:** Bunga setara LPS Bank Umum
- **Keterlibatan Karyawan:** Target + KPI berbasis pemasaran tabungan

Strategi Penyaluran Kredit

- Kerja Sama: PT, Instansi, & Bank Penyalur Sertifikasi Guru
- Target Kredit: Bulanan + Komitmen Tim Bisnis
- Fokus: Kredit Konsumtif, khususnya **Kredit Sertifikasi Guru**
- Penataan SLA: Tingkatkan kualitas layanan kredit

Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR

1. Non-Performing Loan (NPL)

- Penyelesaian melalui **lelang jaminan (APHT)** atau **penjualan sukarela**
- **Monitoring ketat** terhadap kredit berpotensi bermasalah

2. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)

- **Penurunan nilai AYDA** dibukukan secara bertahap Rp20 juta/bulan
- Lakukan **penjualan atau lelang AYDA** untuk perbaikan neraca

3. Konsolidasi Internal

- Bangun **brand image baru** melalui kemitraan dengan perguruan tinggi & pihak eksternal
- **Restrukturisasi organisasi** agar lebih efisien & relevan dengan kebutuhan bisnis
- Tangani **isu internal** pasca penggabungan usaha

Strategi Pemenuhan Ketentuan & Regulasi

- **Inventarisasi regulasi** & identifikasi risiko yang belum tercakup
- Evaluasi dan **perbaiki SOP** agar sesuai regulasi terkini
- Lakukan **monitoring berkala** sesuai *timeline* pemenuhan regulasi

BIDANG USAHA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan Rakyat Mandiri	Tabungan yang diperuntukan untuk masyarakat dan badan usaha
01	01	Tabungan Pendidikan	Tabungan yang diperuntukkan untuk pelajar yang bertujuan untuk mendidik, memperkenalkan dan menumbuhkan budaya menabung sejak dini.
01	01	Tabungan Mahasiswa	Tabungan yang diperuntukan bagi mahasiswa
01	01	Tabungan Simpatik	Tidak Aktif
01	01	Tabungan Sihandal	Tidak Aktif
01	01	Tabungan Kredit BRM	Tabungan yang diperuntukan bagi calon nasabah yang akan mengambil kredit
01	01	Deposito Berjangka	Deposito ini tersedia dalam tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
02	01	Kredit Umum	Kredit yang ditujukan kepada debitur secara umum untuk keperluan kerja dan investasi
02	01	Kredit konsumtif	Kredit yang diberikan untuk mendanai kebutuhan pribadi debitur yaitu kepada pegawai yang berpenghasilan tetap dan juga membiayai guru yang memiliki sertifikat sertifikasi, KIP dan lain lain

PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

Nama BPR : PT. BPR RAKYAT MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Simpanan Pihak Ketiga

- **Tabungan:**

Terjadi kenaikan sebesar **Rp1.219.506.467 (24,86%)**

Dari **Rp4.906.313.496** menjadi **Rp6.125.819.963**

Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan **Tabungan Rakyat Mandiri** dan **Tabungan Pendidikan**.

- **Deposito:**

Meningkat sebesar **Rp1.517.000.000 (11,49%)**

Dari **Rp13.199.000.000** menjadi **Rp14.716.000.000**

Pertumbuhan berasal dari penempatan **Deposito Berjangka** 1, 3, dan 6 bulan.

2. Realisasi Penyaluran Kredit

Total realisasi kredit mencapai **Rp19.322.767.816** atau **87,31% dari target** tahun berjalan, dengan komposisi:

Jenis Kredit	Nilai (Rp)	Persentase
UMKM	12.561.731.357	65,01%
Konsumtif	6.761.036.459	34,99%

Catatan: Kredit konsumtif mengalami peningkatan yang melebihi ekspektasi dibandingkan dengan target awal.

B. Target Pasar

PT BPR Rakyat Mandiri secara strategis membidik segmen pasar yang memiliki potensi tinggi dengan karakteristik pendapatan stabil dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi namun belum optimal terlayani oleh bank umum.

1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Sebagai tulang punggung perekonomian daerah, UMKM menjadi fokus utama BPR melalui penyediaan:

- **Kredit Modal Kerja**
- **Kredit Investasi Usaha**
Solusi pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil di wilayah **Kota Baubau** dan **Kabupaten Buton**.

2. Kredit Sertifikasi Guru

Segmen guru bersertifikasi memiliki:

- **Penghasilan tetap dan rutin (Tunjangan Profesi Guru)**
- **Risiko kredit rendah dan kolektibilitas tinggi**
BPR memberikan fasilitas pinjaman yang **kompetitif dan fleksibel** untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

3. Staf Akademik & Dosen Perguruan Tinggi

Melalui kemitraan strategis dengan universitas:

- Menyediakan kredit berbasis **gaji tetap dan tunjangan**
- Menargetkan kelompok berisiko rendah dengan kebutuhan pembiayaan personal atau produktif

4. Kredit KIP (Kartu Indonesia Pintar)

- Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi
- Menyediakan fasilitas kredit berbasis **Dana Beasiswa KIP**
- Mengacu pada ketentuan internal BPR untuk memastikan tata kelola risiko yang optimal

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEGIATAN PENGEMBANGAN

NO	KEGIATAN PENGEMBANGAN	TANGGAL PELAKSANAAN	PIHAK PELAKSANA	KATEGORI PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Implementasi SAK EP USSI	13-03-2014	02 (Jika Eksternal BPR)	01 (Jika Seluruh Pegawai)	1
2	Webinar Aspek Legal Perkreditan/Pembiayaan	06-04-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1
3	Sertif PE Kepatuhan	22-04-2024	01 (Jika Internal BPR)	03 (Jika PE)	1
4	Webinar SAK EP dan Ter PPh Pasal 21	28-05-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
5	Sosialisasi Pengujian Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur SLIK	31-05-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
6	Penyusunan Laporan IRA	05-06-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
7	Aplikasi SIPENDAR	19-06-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
8	Penerapan Kebijakan ASET	22-06-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
9	Sosialisasi POJK Tata Kelola	13-07-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1
10	Webinar Strategi Implementasi	07-08-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1
11	Webinar Service Enchantment Crafting Memorable Customer Journeys	24-08-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1
12	APU, Ppt dan PPPSPM	10-09-2024	01 (Jika Internal BPR)	01 (Jika Seluruh Pegawai)	8
13	Webinar terkait Laporan Berkala Bulanan BPR	25-09-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	01 (Jika Seluruh Pegawai)	2
14	Workshop SAK EP kepada BPR Se – Sulampua	12-10-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	01 (Jika Seluruh Pegawai)	2
15	Sosialisasi Strategi Anti Fraud	28-10-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1

16	Webinar Sosialisasi Program Restrukturisasi Perbankan	11-11-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	01 (Jika Seluruh Pegawai)	1
17	Sosialisasi premi PRP BPR/BPRS	11-11-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1
18	Webinar Risk and Governance summit (RGS) 2024	26-11-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1
19	Pelatihan Penerapan dan Penggunaan tools SAK EP	02-12-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
20	Sosialisasi Enhancement Validasi Pelaporan SLIK	10-12-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	01 (Jika Seluruh Pegawai)	2
21	Laporan SIPEDULI	18-12-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika PE)	1
22	Capacity Building BPR/BPRS tentang Penerapan Tata Kelola Bank yang baik	20-12-2024	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dekom)	1

PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN & KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
13-01-2024	4	Evaluasi Hasil KPI, Pemenuhan Modal Inti, Persiapan CKPN, Pelaksanaan APU-PPT
27-06-2024	3	Evaluasi RBB, Penyelesaian Kredit Bermasalah
12-12-2024	4	Pembahasan RBB 2025, Penyelesaian NPL, Persiapan RUPS-LB

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
Depid. SE, M.Si	3	0	100,00
Robby Adrian Pondiu	3	0	100,00

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT BPR RAKYAT MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Berikut ini adalah lampiran dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan tahunan, yaitu sebagai berikut :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Takdir	Direktur Utama	Direktur Utama
2	Fredy S. Georges	Direktur	Direktur
3	Fredy S. Georges	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur menjalankan fungsi Kepatuhan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Depid	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Roby Adrian Pondiu	Komisaris	Komisaris

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS PADA PT. BPR RAKYAT MANDIRI

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Takdir	490.000.000	2,81
2	Fredy S. Geonges	384.000.000	2,20

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Depid	872.000.000	4,99
2	Roby Adrian Pondiu	1.308.000.000	7,50

HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fredy S. Geonges	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Fredy S. Geonges	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Takdir	tidak ada	tidak ada	tidak ada

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Takdir	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Fredy S. Geonges	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Fredy S. Geonges	tidak ada	tidak ada	tidak ada

HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Depid	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Roby Adrian Pondiu	tidak ada	tidak ada	tidak ada

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Depid	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Roby Adrian Pondiu	tidak ada	tidak ada	tidak ada

JUMALAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	1,20	0,30	2,50	0.500	Direksi terus berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	1,20	0,20	2,40	0.360	Dewan Komisaris berupaya konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak Ada Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	1,20	0,30	2,50	0.250	BPR telah melakukan upaya-upaya dalam menghindari transaksi benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,12	0,30	2,62	0.262	BPR telah melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	1,00	0,28	2,48	0.248	BPR telah memperkuat kinerja fungsi audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,00	0,30	2,30	0.058	BPR telah menindaklanjuti hasil audit ekstern
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,20	0,30	2,84	0.284	Pelaksanaan Manajemen risiko telah dijalankan sesuai dengan jenis risiko yang ditetapkan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,40	0,45	3,35	0.251	BPR telah melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	RBB telah disusun secara proporsional dan terukur serta telah memperhatikan ketentuan yang ada
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,10	0,25	2,85	0.214	Laporan keuangan telah disajikan dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						2.7	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Direksi 2 Orang, Direktur Operasional bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruhnya berdomisili di Kota Baubau
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Seluruh Anggota Direksi dan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi Tidak Memiliki Penasihat ataupun Penyedia Jasa Profesional secara resmi maupun tidak resmi
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen serta tidak memberikan kuasa tanpa batasan limit dan waktu
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi rutin mengirimkan data/lap kepada komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Dilakukan secara musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Direksi tidak menggunakan atau menerima fasilitas dari BPR selain dari yang telah ditetapkan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi mengikutsertakan pegawai dalam training2, sertifikasi kompetensi PE dan senantiasa mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Implementasi Kompetensi tercermin dari peningkatan kinerja
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	memiliki Pedoman dan tata tertib direksi
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Meliputi Penilaian Karyawan dan Perubahan Renumerasi
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Telah didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Pencapaian kinerja 2024 tetap terjaga dengan baik
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	dilakukan sesuai ketentuan
Total nilai skala penerapan		15	
Rata-rata		3,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,30	

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Memiliki 2 Orang Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Sama dengan Jumlah Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kompetensi
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum memiliki Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Tidak Mengkap Jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama dewan komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Tidak memiliki komisaris independen
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris rutin memberikan masukan kepada Direksi baik tertulis maupun lisan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	telah dilakukan pemantauan rutin dan berkala
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan komisaris menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris proaktif dalam melakukan monitoring akan tindaklanjut temuan audit
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Rapat Rutin telah dilaksanakan minimal 1 X dalam triwulan

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Dewan komisaris tidak melakukan atau menerima apapun dari BPR diluar ketentuan yang seharusnya
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	telah dilakukan pemantauan rutin dan berkala
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	seluruh risalah rapat telah terdokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR Telah Memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Tidak ada transaksi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
Nilai Hasil			
		0,30	

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Direktur Operasional menjalankan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yg membawahi kepatuhan memahami peraturan berkaitan dgn BPR
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah menunjuk PE Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	telah memiliki ketentuan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan
Total nilai skala penerapan		12	
Rata-rata		2,40	
Bobot		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
Nilai struktur		1,20	
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yg membawahi kepatuhan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan ketentuan dan peraturan terkait BPR
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Budaya kepatuhan tercermin dalam kebijakan pengelolaan SDM salah satunya KPI
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	pemantauan rutin dilakukan termasuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Review telah dilakukan secara berkala
Total nilai skala penerapan		14	
Rata-rata		2,80	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		1,12	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	trend pelanggaran telah mengalami penurunan
D. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	telah disampaikan sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	tidak ditemukan penyimpangan keputusan direksi
Total nilai skala penerapan		9	
Rata-rata		3,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,30	

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah menunjuk PE Audit Internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	telah dilakukan pengkinian ketentuan audit internal
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE audit internal independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Dilaksanakan sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	pengembangan kompetensi PE audit internal melalui sertifikasi dan pelatihan
Total nilai skala penerapan		12	
Rata-rata		2,40	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,20	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR mengugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR mengikutsertakan PE Audit internal dalam pelatihan audit internal
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		2,50	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	tidak ada pengangkatan atau pemberhentian PE audit internal
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan diberikan telah sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah menunjuk PE Manajemen resiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	telah dipenuhi sesuai ketentuan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	telah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	dilakukan sesuai ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	dilakukan sesuai ketentuan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	dilakukan sesuai ketentuan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	dilakukan sesuai ketentuan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dilakukan sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	dilakukan sesuai ketentuan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	dilakukan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dilakukan sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	tidak ada produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
D. Nilai Hasil			
	Nilai Hasil	0,30	

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	telah dipenuhi sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	telah dijalankan sesuai ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	4	Terdapat Indikasi pelanggaran ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	telah dijalankan sesuai rekomendasi OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	terdapat pelanggaran BMPK berdasarkan audit OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	4,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,45	

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Telah disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	telah dipenuhi sesuai ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modal dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	didukung penuh oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	dipenuhi sesuai ketentuan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	evaluasi berkala dilakukan oleh dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dipenuhi sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Rakyat Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	telah dipenuhi sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	dijalankan sesuai ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dijalankan sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dijalankan sesuai ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dijalankan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah dipenuhi sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	dijalankan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR RAKYAT MANDIRI
Posisi : B

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,70	3
Analisis	
Terjadi penurunan Nilai Komposit jika dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini didasarkan pada hasil temuan OJK dan hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2024. Secara umum seluruh faktor-faktor akan menjadi fokus perbaikan pada tahun 2025 melalui upaya konkrit, terukur dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku	